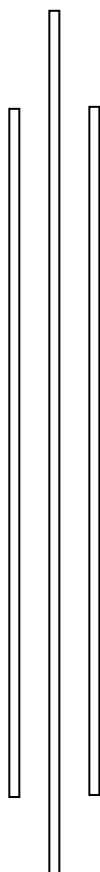




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2013
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2013

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	3
Laporan Realisasi Anggaran.....	...
Neraca
Catatan Atas Laporan Keuangan	6
- BAB I Pendahuluan	6
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	10
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	12
- BAB IV Kebijakan Akuntansi	15
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	19
Lampiran – lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, Januari 2014

Kepala SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar

(Drs. MOLAN, MM)

Pembina Utama Muda

NIP. 19580922 198503 1 011

SKPD PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(diganti Print out Simda)

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2013;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2013)

SKPD

NERACA

PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

(diganti Print out Simda)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2013 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2013 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 3.222.416.650,00 mencapai 90,26 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 10.843.276.073,- atau mencapai 97,64 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2013 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 32.106.323.707,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 116.549.150,00, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00, aset tetap sebesar Rp. 31.928.611.757,00, dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 61.162.800,00

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 0,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 32.106.323.707,00 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 116.549.150,00 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 31.989.774.557,00 dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp. 0,00

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/A);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 38/A);

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN
TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2013, SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai 13 (tiga belas) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi ;
- f. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ;
- g. Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri ;

- h. Program Penataan Struktur Industri
- i. Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD ;
- j. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ;
- k. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;
- l. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan ;
- m. Program Pengelolaan Pasar Daerah ;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 secara keseluruhan sebesar **(Rp. 7.536.617.409,50)** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	3.568.663.097,00
2	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	8.609.301.106,50
3	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	2.495.979.400,00
	Surplus/(Defisit)	(7.536.617.409,50)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.07.01.01 tanggal 11 Oktober 2013 sebesar (Rp. 7.536.617.409,50) terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 11.105.280.506,50 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 3.568.663.097,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100)$
1	Pendapatan	3.568.663.097,00	3.222.416.650,00	90,29
	- Hasil Retribusi Daerah	2.979.114.130,00	2.729.971.100,00	91,63
	- Hasil Pengelolaan Daerah dipisahkan	589.548.967,00	492.445.550,00	83,53
2	Belanja	11.105.280.506,50	10.843.276.073,00	97,64
	- Belanja Operasi	8.609.301.106,50	8.366.240.673,00	97,17
	- Belanja Modal	2.495.979.400,00	2.477.035.400,00	99,24
	- Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	(7.536.617.409,50)	(7.620.859.423,00)	101,11

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2013 mencapai hasil 90,26 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dicapai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal yaitu sebesar Rp. 3.222.416.650,00 dari target sebesar Rp. 3.568.663.097,00 atau 90,26 persen.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2013 sebesar Rp. 10.843.276.073,00 atau 97.64 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 262.004.433,50 atau 2,36 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
	1	2	3	4
1	Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji dll)	4.284.795.106,50	4.217.142.336	98,42
2	Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	604.619.000,00	575.807.421,00	95,23
3.	Peningkatan sarana dan Prasarana paratur	558.758.000	556.212.590	99,54
4.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.450.000,00	4.762.825,00	73,84
5.	Pengembangan sistem inovasi Teknologi Industri	59.183.000,00	58.188.000,00	98,32
6.	Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi	199.310.000,00	197.690.000,00	99,19
7.	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi dalam rangka pembinaan lingkungan di sekitar IHT (DBHCHT)	126.000.000,00	119.264.000,00	94,65
8.	Pelatihan pertukangan bagi masyarakat di Kabupaten Blitar	49.999.000,00	46.300.000,00	92,60
9.	Fasilitasi bagi industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	99.230.000,00	92.155.000,00	92,87
10.	Fasilitasi bagi industri Kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry	1.307.450.000,00	1.247.043.500,00	95,38
11.	Fasilitasi bagi industri Kecil dan menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya dalam rangka pembinaan Lingkungan di sekitar IHT (DBHCHT)	549.000.000,00	536.310.000,00	97,69
12.	Pembinaan kemampuan teknologi industry	39.410.000,00	38.335.000,00	97,27
13.	Pengembangan dan pelayanan teknologi industry	301.640.000,00	293.989.400,00	97,46
14.	Penyediaan sarana maupun sarana klaster industry	99.020.000,00	94.025.000,00	94,96
15.	Penyediaan sarana informasi melalui pendataan industri rokok di Kabupaten Blitar (DBHCHT)	25.000.000,00	14.271.300,00	57,09

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
16.	Pendampingan BUMD	22.925.000,00	22.925.000,00	100
17.	Penyusunan dan sosialisasi Ranperda	47.750.000,00	47.750.000,00	100
18.	Pembinaan dan Pengendalian BUMD	4.850.000,00	4.850.000,00	100
19.	Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian kredit program	14.425.000,00	6.186.171,00	42,89
20.	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	37.790.000,00	34.190.000,00	90,47
21.	Promosi produk unggulan Kabupaten Blitar	199.100.000,00	196.217.130,00	98,55
22.	Pengadaan kendaraan dinas dan operasional resi gudang (sisa DAK 2011)	103.576.400,00	99.676.400,00	96,23
23.	Pengembangan pengelolaan sistem resi gudang	44.100.000,00	43.900.000,00	99,55
24.	Promosi produk unggulan Daerah melalui media elektronika	300.000.000,00	291.490.000,00	97,16
25.	Kegiatan pembinaan organisasi Pedagang Kaki Lima dan asongan	159.155.000,00	156.405.000,00	98,27
26.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar tradisional	901.980.000,00	899.580.000,00	99,62
27.	Monev dan pembinaan pasar tradisional	15.300.000,00	15.300.000,00	100
28.	Renovasi pasar tradisional (DAK)	795.080.000,00	786.057.400,00	98,87
29.	Pendamping DAK renovasi pasar tradisional	149.385.000,00	148.252.600,00	99,24
	TOTAL	11.105.280.506,50	10.843.276.073,00	97,64

3.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja.

Pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal hanya pada :

1. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi Melalui Pendataan Industri Rokok di Kabupaten Blitar hanya sebesar Rp. 14.271.300,- (sebesar 57,09%) dengan penjelasan bahwa kegiatan yang dimaksudkan untuk mendata sekaligus memantau kondisi dan keberadaan perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Blitar. Dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- hanya terserap sebesar Rp. 14.271,300,- hal ini disebabkan bahwa rencana anggaran tersebut sebagian besar adalah belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (80%) dari total anggaran dengan perkiraan perusahaan rokok di Kabupaten Blitar kurang lebih 160 unit (data 2007). Namun kenyataannya setelah dilakukan pendataan keseluruhan kecamatan ternyata keberadaan perusahaan rokok di Kabupaten Blitar tinggal 65 unit dengan rincian 15 unit masih aktif memproduksi dan 50 unit sudah tidak memproduksi, sehingga perjalanan dinas yang dilaksanakan hanya sebagian. Dan belanja makan dan minuman rapat juga tidak terserap karena tidak ada rapat.
2. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Kredit terserap sebesar Rp. 6.186.171,- (42,89%) karena bagian bunga dari kredit jasa produksi untuk BPR Artha selaras yang masuk ke Kasda rendah sehingga penyerapan belanja jasa pengelolaan dana bergulir yang dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,- hanya terserap Rp. 1.741.171,- dan anggaran makan minum tidak terserap sebesar Rp. 980.000,00 karena tidak terlaksananya pertemuan dengan para debitur kredit program setelah Perubahan Anggaran Kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
a. Aset		32.106.323.707,00	6.096.139.107,00
	Saldo Aset SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 32.106.323.707,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(1)	Aset Lancar	116.549.150,00	97.767.100,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	31.928.611.757,00	5.937.209.207,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	61.162.800,00	61.162.800,00
Jumlah Aset		32.106.323.707,00	6.096.139.107,00

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
1) Aset Lancar		116.549.150,00	97.767.100,00
	Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 116.549.150,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Kas	8.592.600,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	66.151.000,00	68.260.000,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	46.747.000,00	32.108.000,00
(e)	Penyisihan piutang tidak tertagih	(4.941.450,00)	(2.600.900,00)
Jumlah		116.549.150,00	97.767.100,00

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
(a) Kas		8.592.600,00	0,00
	Saldo Kas SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 8.592.600,00 terdiri atas:		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	8.592.600,00	0,00
Jumlah		8.592.600,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan tepatnya di Kas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah realisasi pendapatan retribusi yang telah dipungut per tanggal 30 dan 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	926.000,00	Pasar Bendorejo
2.	Retribusi Kebersihan	60.000,00	Pasar Bendorejo
3.	Retribusi Pelayanan Pasar	4.648.000,00	Pasar Wlingi
4.	Retribusi Kebersihan	232.600,00	Pasar Wlingi
5.	Retribusi Pelayanan Pasar	220.000,00	Pasar Garum
6.	Retribusi Kebersihan	30.000,00	Pasar Garum
7.	Retribusi Pelayanan Pasar	22.000,00	Pasar Gandusari
8.	Retribusi Pelayanan Pasar	327.000,00	Pasar Talun
9.	Retribusi Kebersihan	40.000,00	Pasar Talun
10.	Retribusi Kebersihan	40.000,00	Pasar Kademangan
11.	Retribusi Pelayanan Pasar	400.000,00	Pasar Kademangan
12.	Retribusi Kekayaan Daerah	68.000,00	Pasar Ngembul
13.	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000,00	Pasar Ngembul
14.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.486.000,00	Pasar Kesamben
15.	Retribusi Kebersihan	42.500,00	Pasar Kesamben
	JUMLAH	8.592.600,00	

Pendapatan tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2014

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Piutang Retribusi	61.209.550,00	68.260.000,00

Saldo Piutang Retribusi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 61.209.550,00 dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Retribusi	Rp. 66.151.000,00
Pengurangan-Penyisihan piutang yang tidak tertagih	<u>Rp. (4.941.450,00)</u>
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2013	Rp. 61.209.550,00

Untuk Perhitungan Piutang Tidak Tertagih-piutang retribusi bisa di lihat di lampiran.

Saldo piutang retribusi sebesar sebesar Rp. 61.209.550,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2009	8.292.400,00
2	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2010	5.671.350,00
3	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2011	16.815.600,00
4.	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2012	7.026.200,00
5.	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2013	23.404.000,00
	Jumlah	61.209.550,00

Penyisihan Piutang tidak tertagih	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	(Rp)	(Rp)
	(4.941.450,00)	(2.600.900,00)

Saldo penyisihan piutang tidak tertagih SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar (Rp. 4.941.450,00) dengan perincian :

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2009	2.073.100,00
2	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2010	630.150,00
3	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2011	1.868.400,00
4.	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2012	396.800,00
5.	Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa kios) tahun 2013	0,00
Jumlah		4.941.450,00

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	(Rp)	(Rp)
(c) Piutang lain-lain	0,00	0,00

Saldo piutang lain-lain SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
Jumlah		0,00

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	(Rp)	(Rp)
(d) Persediaan	46.747.000,00	32.108.000,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 46.747.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	246.000,00
(2)	Amplop	180.000,00
(3)	Karcis	44.667.000,00
(4)	Blangko	1.434.000,00
(5)	Map	200.000,00
	Jumlah	46.747.000,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)	
		31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)

2) **Investasi Jangka Panjang** 0,00 0,00

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar nihil.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
3) Aset Tetap	31.928.611.757,00	5.937.209.207,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 5.937.209.207,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 31.928.611.757,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Tanah	19.134.194.000,00	225.750.000,00
(b)	Peralatan dan Mesin	1.293.968.607,00	589.220.707,00
(c)	Gedung dan Bangunan	11.480.284.150,00	5.102.073.500,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.165.000,00	14.165.000,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00
(f)	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset		31.928.611.757,00	5.937.209.207,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 23.514.367.150,00, - diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (Rp. 31.928.611.757,00 - Rp. 5.937.209.207,00 = Rp. 23.514.367.150,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
(a) Tanah	19.134.194.000,00	225.750.000,00

Saldo Tanah SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 19.134.194.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Tanah Kantor		Rp. 225.750.000,00
Jumlah		Rp. 225.750.000,00
Penambahan		
		Rp. 0,00
Jumlah		Rp. 0,00
Penyesuaian/Koreksi		
Tanah Sarana Umum Pasar Daerah		Rp. 18.908.444.000,00
Jumlah		Rp. 18.908.444.000,00

Penghapusan/Pengurangan		
	<i>Jumlah</i>	Rp. (0,00)
Saldo akhir		Rp.
Tanah Kantor		Rp. 225.750.000,00
Tanah Sarana Umum Pasar Daerah		Rp. 18.908.444.000,00
	<i>Jumlah</i>	Rp. 19.134.194.000,00

Penyesuaian/Koreksi tanah sebesar Rp. 18.908.444.000,00 adalah mutasi asset dari BPKAD karena perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2013.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	1.293.968.607,00	589.220.707,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.293.968.607,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 33.689.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak	Rp. 1.500.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Sepeda	Rp. 425.000,00
Peralatan Pertanian	Rp. 7.000.000,00
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp. 4.000.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp. 3.240.000,00
Peralatan Kantor Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. 400.000,00
Mesin Jahit	Rp. 900.000,00
Meja Diplay	Rp. 10.000.000,00
Etalase	Rp. 4.000.000,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp. 72.694.805,00
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp. 7.600.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp. 11.220.000,00
Perlengkapan Kantor White Board	Rp. 840.000,00
Perlengkapan Kantor Penunjuk Waktu	Rp. 320.000,00
Perlengkapan Kantor Rak Buku	Rp. 13.780.799,00
Billboard/Papan Nama	Rp. 5.850.000,00
Papan Data	Rp. 3.900.000,00
Perlengkapan Kantor Lainnya	Rp. 168.000,00
Komputer PC	Rp. 149.452.911,00
Komputer Laptop	Rp. 23.663.654,00
Printer	Rp. 36.329.111,00
Monitor/Display	Rp. 1.542.324,00
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp. 8.245.000,00
Meja kerja	Rp. 72.867.849,00
Meja rapat	Rp. 480.000,00
Kursi kerja	Rp. 25.427.166,00
Kursi rapat	Rp. 12.171.381,00
Rak buku/tv/kembang	Rp. 180.000,00
Jam dinding/meja	Rp. 24.000,00
Genset	Rp. 8.700.000,00
Kipas Angin	Rp. 15.120.000,00
AC	Rp. 21.250.000,00
Kamera	Rp. 6.000.000,00
Proyektor	Rp. 7.500.000,00

Amplifier/Mixer Audio	Rp.	599.707,00
Microphone	Rp.	10.000.000,00
Telepon	Rp.	1.320.000,00
Faximili	Rp.	1.200.000,00
Timbangan	Rp.	4.000.000,00
Alat-alat Ukur Lainnya	Rp.	500.000,00
Alat-alat Titrasi	Rp.	1.120.000,00
Jumlah	Rp.	589,220,707,00
Penambahan		
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp.	216.719.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pickup	Rp.	99.676.400,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp.	173.300.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak	Rp.	50.600.000,00
Tenda	Rp.	55.500.000,00
Komputer PC	Rp.	12.250.000,00
Printer	Rp.	14.300.000,00
Jumlah	Rp.	622.345.400,00
Penyesuaian/Koreksi		
AC	Rp.	15.000.000,00
Etalase	Rp.	55.500.000,00
Alat-alat angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak	Rp.	38.062.500,00
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp.	5.600.000,00
Peralatan Kantor Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	12.200.000,00
Perlengkapan Kantor dan Almari	Rp.	11.250.000,00
Meja Kerja	Rp.	10.410.000,00
Kursi Kerja	Rp.	2.880.000,00
TV	Rp.	600.000,00
Amplifier/mixer audio	Rp.	1.400.000,00
Jumlah	Rp.	152.902.500,00
Penghapusan/Pengurangan		
Jumlah	Rp.	0,00
Keterangan		
Reklasifikasi dari Tenda ke etalase	Rp.	55.500.000,00
Reklasifikasi dari Kipas angin ke AC	Rp.	15.000.000,00
Mutasi Aset dari BPKAD karena perubahan struktur organisasi Pemda Tahun 2013	Rp.	82.402.500,00
Saldo akhir		
Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	Rp.	216.719.000,00
Alat-alat angkutan darat bermotor pick up	Rp.	99.676.400,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp.	206.989.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak	Rp.	90.162.500,00
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Sepeda	Rp.	425.000,00
Peralatan Pertanian	Rp.	7.000.000,00
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp.	9.600.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp.	3.240.000,00
Peralatan Kantor Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	12.600.000,00
Mesin Jahit	Rp.	900.000,00
Meja Diplay	Rp.	10.000.000,00
Etalase	Rp.	4.000.000,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp.	83.944.805,00

Perlengkapan Kantor Brankas	Rp.	7.600.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp.	11.220.000,00
Perlengkapan Kantor White Board	Rp.	840.000,00
Perlengkapan Kantor Penunjuk Waktu	Rp.	320.000,00
Perlengkapan Kantor Rak Buku	Rp.	13.780.799,00
Billboard/Papan Nama	Rp.	5.850.000,00
Papan Data	Rp.	3.900.000,00
Perlengkapan Kantor Lainnya	Rp.	168.000,00
Komputer PC	Rp.	161.702.911,00
Komputer Laptop	Rp.	37.963.654,00
Printer	Rp.	36.329.111,00
Monitor/Display	Rp.	1.542.324,00
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp.	8.245.000,00
Meja kerja	Rp.	83.277.849,00
Meja rapat	Rp.	480.000,00
Kursi kerja	Rp.	28.307.166,00
Kursi rapat	Rp.	12.171.381,00
Rak buku/tv/kembang	Rp.	180.000,00
Jam dinding/meja	Rp.	24.000,00
Genset	Rp.	8.700.000,00
Kipas Angin	Rp.	15.120.000,00
AC	Rp.	21.250.000,00
Kamera	Rp.	6.000.000,00
Proyektor	Rp.	7.500.000,00
Amplifier/Mixer Audio	Rp.	1.999.707,00
Microphone	Rp.	10.000.000,00
TV	Rp.	600.000,00
Telepon	Rp.	1.320.000,00
Faximili	Rp.	1.200.000,00
Timbangan	Rp.	4.000.000,00
Alat-alat Ukur Lainnya	Rp.	500.000,00
Alat-alat Titrasi	Rp.	1.120.000,00
Jumlah akhir	Rp	1.293.968.607,00

➤ Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar Rp. 622.345.400,00 berasal dari:

Belanja Modal Dinas Perindag TA 2013 sebesar Rp. 622,345,400.00,00

➤ Penyesuaian / Koreksi / Reklasifikasi peralatan dan mesin sebesar Rp.152.902.500,00 tersebut dengan perincian sebagai berikut;

a. Merupakan reklasifikasi sesuai surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 28 Januari 2014 Nomor: 900/38/409.111/20104 Perihal Koreksi / reklasifikasi pada asset tetap,

- Pengadaan Tenda (TA 2013) sebesar Rp. 55.500.000,- seharusnya Etalase sebesar Rp. 55.500.000,-

- Kipas Angin sebesar Rp. 15.120.000,- seharusnya masuk di AC sebesar Rp.15.000.000,- dan Kipas Angin hanya sebesar Rp. 120.000,-

b. Mutasi asset dari BPKAD karena adanya perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2013 sebesar Rp. 82.402.500,00

- Alat-alat angkutan Darat Tidak Bermotor Gerobak Rp. 38.062.500,00

- Peralatan Kantor Mesin Tik Rp. 5.600.000,00

- Peralatan Kantor Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 12.200.000,00

- Perlengkapan Kantor dan Almari Rp. 11.250.000,00

- Meja Kerja	Rp.	10.410.000,00
- Kursi Kerja	Rp.	2.880.000,00
- TV	Rp.	600.000,00
- Amplifier/Mixer Audio	Rp.	1.400.000,00

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
(c) Gedung dan Bangunan	11.480.284.150,00	5.102.073.500,00

Saldo gedung dan bangunan SKPD Dinas Perindustria dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 11.480.284.150,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Gedung Kantor	Rp. 386.357.000,00
Bangunan Gudang	Rp. 4.245.816.500,00
Bangunan Pasar/Pertokoan	Rp. 450.000.000,00
Bangunan Tempat Parkir	Rp. 19.900.000,00
Jumlah	Rp. 5.102.073.500,00
Penambahan	
Bangunan Gudang	Rp. 21.800.000,00
Bangunan Pasar	Rp. 1.832.890.000,00
Jumlah	Rp. 1.854.690.000,00
Penyesuaian/Koreksi	
Bangunan Gedung Kantor	Rp. 3.323.695.400,00
Bangunan Pasar/Pertokoan	Rp. 1.100.575.250,00
Bangunan kamar mandi/MCK	Rp. 99.250.000,00
Jumlah	Rp. 4.523.520.650,00
Penghapusan/Pengurangan	
Jumlah	Rp (0,00)
Saldo akhir	
Gedung Kantor	Rp. 3.710.052.400,00
Bangunan Gudang	Rp. 4.267.616.500,00
Bangunan Pasar/Pertokoan	Rp. 3.383.465.250,00
Bangunan Tempat Parkir	Rp. 19.900.000,00
Bangunan Kamar mandi/MCK	Rp. 99.250.000,00
Jumlah	Rp. 11.480.284.150,00

➤ Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp. 1.854.690.000,00 berasal dari:

- ❖ Belanja Modal sebesar Rp. 1.854.690.000,00
 - Bangunan Pasar Rp. 1.832.890.000,00
 - Bangunan Gudang Rp. 21.800.000,00

➤ Penyesuaian/Koreksi Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp. 4.523.520.650,00 berasal dari:

- ❖ Mutasi aset dari BPKAD karena adanya perubahan struktur organisasi Pemda Tahun 2013 sebesar Rp. 4.523.520.650,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Gedung Kantor Rp. 3.323.695.400,00
 - b. Bangunan Pasar/pertokoan Rp. 1.100.575.250,00
 - c. Bangunan kamar mandi/MCK Rp. 99.250.000,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	14.165.000,00	14.165.000,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 14.165.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Jaringan Irigasi	Rp.	10.000.000,00
Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rp.	3.400.000,00
Instalasi Listrik	Rp.	765.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp.	14.165.000,00
Penambahan		
<i>Jumlah</i>	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi		
<i>Jumlah</i>	Rp.	0,00
Penghapusan/Pengurangan		
<i>Jumlah</i>	Rp	(0,00)
Saldo akhir	Rp	14.165.000,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
(e) Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Maket/ miniatur	Rp.	6.000.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp.	6.000.000,00
Penambahan		
<i>Jumlah</i>	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi		
<i>Jumlah</i>	Rp.	0,00
Penghapusan/Pengurangan		
<i>Jumlah</i>	Rp	(0,00)
Saldo akhir	Rp	
Maket/ miniatur	Rp.	6.000.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp.	6.000.000,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2010</u> <u>(Rp)</u>
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Saldo Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
5) Aset Lainnya	61.162.800,00	61.162.800,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 61.162.800,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 61.162.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	0,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	61.162.800,00	61.162.800,00
Jumlah Aset		61.162.800,00	61.162.800,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
(a) Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
.....	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penambahan		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
.....	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
.....	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penghapusan/Pengurangan		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	(0,00)
.....	Rp.	(0,00)
Jumlah	Rp	(0,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	<i>0,00</i>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>	Rp	<i>(0,00)</i>
Saldo akhir	Rp	0,00

	31 Desember 2013	31 Desember 2012
	(Rp)	(Rp)
(b) Aset Lain-lain	61.162.800,00	61.162.800,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 61.162.800,00, terdiri dari (Ex :Aset Tetap yang rusak sebesar Rp. 61.162.800,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp.	2.240.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp.	18.240.000,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp.	7.800.000,00
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp.	240.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp.	7.200.000,00
Kipas Angin	Rp.	120.000,00
Papan Data (peta)	Rp.	320.000,00
Komputer Laptop (note book)	Rp.	15.000.000,00
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp.	400.000,00
Meja kerja (meja tulis)	Rp.	1.200.000,00
Meja rapat (meja rapat dan sice)	Rp.	3.460.000,00
Kursi kerja (kursi putar dan kursi kayu)	Rp.	860.000,00
Kursi rapat (kursi besi dan kursi lipat)	Rp.	1.740.000,00
Rak buku/tv/kembang	Rp.	600.000,00
Jam dinding/meja	Rp.	72.000,00
Kipas Angin	Rp.	240.000,00
Tape	Rp.	150.000,00
Kamera	Rp.	1.240.800,00
Microphone	Rp.	40.000,00
Jumlah	Rp.	61.162.800,00
Penambahan		
Jumlah	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi		
Jumlah	Rp.	0,00
Penghapusan/Pengurangan		
Jumlah	Rp	(0,00)
Saldo akhir	Rp	0,00
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp.	2.240.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp.	18.240.000,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp.	7.800.000,00
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp.	240.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp.	7.200.000,00
Kipas Angin	Rp.	120.000,00
Papan Data (peta)	Rp.	320.000,00
Komputer Laptop (note book)	Rp.	15.000.000,00
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp.	400.000,00
Meja kerja (meja tulis)	Rp.	1.200.000,00
Meja rapat (meja rapat dan sice)	Rp.	3.460.000,00
Kursi kerja (kursi putar dan kursi kayu)	Rp.	860.000,00
Kursi rapat (kursi besi dan kursi lipat)	Rp.	1.740.000,00
Rak buku/tv/kembang	Rp.	600.000,00
Jam dinding/meja	Rp.	72.000,00
Kipas Angin	Rp.	240.000,00
Tape	Rp.	150.000,00

Kamera	Rp.	1.240.800,00
Microphone	Rp.	40.000,00
Jumlah	Rp.	61.162.800,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
b. Kewajiban	0,00	0,00

Saldo Kewajiban SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 0,00 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	0,00
(b)	0,00
Jumlah Hutang		0,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00.

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
c. Ekuitas Dana	32.106.323.707,00	6.096.139.107,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 32.106.323.707,00 dengan rincian sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
1) Ekuitas Dana Lancar	116.549.150,00	97.767.100,00

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 116.549.150,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	61.209.550,00
(b)	Cadangan Persediaan	46.747.000,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	8.592.600,00
(d)	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		116.549.150,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
2) Ekuitas Dana Investasi	31.989.774.557,00	5.998.372.007,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 31.989.774.557,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	31.928.611.757,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	61.162.800,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		31.989.774.557,00

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 0,00.

2. **PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
a. Pendapatan	3.222.416.650,00	3.003.968.406,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2013 serta realisasi Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	Pendapatan Asli Daerah	3.568.663.097,00	3.222.416.650,00	3.003.968.406,00
(1)	Hasil retribusi Daerah	2.979.114.130,00	2.729.971.100,00	2.518.102.350,00
	- Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	153.065.000,00	138.158.000,00	127.960.700,00
	- Retribusi pelayanan pasar	2.564.892.330,00	2.337.294.100,00	2.091.108.900,00
	- Retribusi pemakaian keayahan Daerah	258.156.800,00	251.519.000,00	298.682.750,00
	1) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol	3.000.000,00	3.000.000,00	350.000,00
(2)	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	589.548.967,00	492.445.550,00	483.790.806,00
	2) Perusahaan Daerah Savitri Indah	75.000.000,00	75.000.000,00	55.000.000,00
	3) Bank Perkreditan Rakyat	514.548.967,00	417.445.550,00	428.790.806,00
(3)	Lain-lain pendapatan yang syah			2.075.250,00
	4) Pendapatan bunga dari pemberian pinjaman			2.075.250,00
	Jumlah	3.568.663.097,00	3.222.416.650,00	3.003.968.406,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
b. Belanja	10.843.276.073,00	5.833.862.569,53

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2013 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tersebut merupakan penggunaan anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2013 sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1) Belanja Operasi	8.366.240.673,00	5.142.862.569,53

Belanja Operasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2013 Rp. 8.366.240.673,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
(a)	Belanja Pegawai	4.419.915.106,50	4.338.692.336,00	2.466.709.632,53
(b)	Belanja Barang dan Jasa	4.189.386.000,00	4.027.548.337,00	2.676.277.937,00
(c)	Belanja Modal	2.495.979.400,00	2.477.035.400,00	690.875.000,00
	Jumlah	8.609.301.106,00	8.366.240.673,00	5.142.862.569,53

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar realisasi tahun 2013 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	Belanja Tidak Langsung	4.284.795.106,50	4.217.142.336,00	2.270.359.132,53
	Belanja Pegawai	4.284.795.106,50	4.217.142.336,00	2.270.359.132,53
	Gaji dan Tunjangan	3.981.639.400,00	3.966.111.259,00	2.077.430.300,00
	Tambahan Penghasilan PNS	154.200.000,00	140.550.000,00	91.600.000,00
	Insentif Pemungutan retribusi Daerah	148.955.706,50	110.481.077,00	101.328.832,53
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	4.284.795.106,50	4.217.142.336,00	2.270.359.132,53
	Belanja Langsung	6.820.485.400,00	6.626.133.737,00	3.563.503.437,00
	Belanja Pegawai	135.120.000,00	121.550.000,00	196.350.500,00
	Honorarium PNS	134.120.000,00	120.550.000,00	172.350.500,00
	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	24.000.000,00
	Belanja Barang/Jasa	4.189.386.000,00	4.027.548.337,00	2.676.277.937,00
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	61.479.000,00	39.442.730,00	66.565.000,00
	Belanja Bahan/Material	37.500.000,00	37.500.000,00	58.373.000,00
	Belanja Jasa Kantor	485.350.000,00	467.251.012,00	109.105.165,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.600.000,00	29.343.590,00	20.830.300,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.298.000,00	235.204.175,00	242.017.650,00

	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang /Parkir	100.500.000,00	97.657.130,00	136.600.000,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.750.000,00	18.750.000,00	12.500.000,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	5.100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	30.529.000,00	19.015.000,00	29.264.000,00
	Belanja Pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	12.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	269.410.000,00	249.184.200,00	205.832.650,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	59.800.000,00
	Belanja Pemeliharaan	14.710.000,00	11.782.000,00	12.340.172,00
	Belanja Jasa Konsultasi	65.100.000,00	65.100.000,00	349.600.000,00
	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	2.806.560.000,00	2.7373.318.500,00	1.422.000.000,00
	Belanja Transport local Non PNS	21.600.000,00	18.000.000,00	33.850.000,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	6.820.485.400,00	6.626.133.737,00	3.563.503.437,00
	Jumlah 1 dan 2	11.105.280.506,50	10.843.276.073,00	3.563.503.437,00

Realisasi Belanja tidak Langsung sebesar Rp. 4.217.142.336,- dan terdapat setor kembali sebesar Rp. 1.200.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Setor kembali Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai untuk bulan Januari s/d Juni an. Suwito sebesar Rp. 600.000,- sesuai STS NO. GD/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013
2. Setor kembali Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai untuk bulan Juli s/d Desember an. Suwito sebesar Rp. 600.000,- sesuai STS No. 00002/STS/2.07.01.01/2013 tanggal 23 Desember 2013

31 Desember 2013
(Rp)

31 Desember 2012
(Rp)

2) Belanja Modal

2.477.035.400,00

690.875.000,00

Belanja Modal SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2013 Rp. 2.477.035.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 1	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	493.976.400,00	489.695.400,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	50.800.000,00	50.600.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	Udara			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	20.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	900.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	55.854.000,00	55.500.000,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.904.000,00	26.550.000,00	31.683.000,00
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	0,00	39.367.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	0,00	500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 2	627,534,400,00	622,345,400,00	92,450,000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dan Gedung			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.868.445.000,00	1.854.690.000,00	598.425.000,00
	Jumlah 3	1.868.445.000,00	1.854.690.000,00	598.425.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Jumlah 4	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah (5)	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Modal	2.495.979.400,00	2.477.035.400,00	690.875.000,00

Blitar, Januari 2014
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

Drs. MOLAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580922 198503 1 011

Lampiran - lampiran